

**Peran DPPKAD dalam Manajemen Keuangan Daerah
(Studi tentang Pengelolaan PAD)
Kabupaten Morowali Tahun 2008-2011**

Rusman (Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin)
Hasrat Arief Saleh (Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin)
Suhardiman Syamsu (Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin)
Email: rusman11@gmail.com

Abstract

This study aims to obtain an overview of the role of DPPKAD in the management of Morowali Regency PAD in 2008-2012 and to know the factors that affect the role of DPPKAD in the management of Morowali Regency PAD in 2008-2011. Type a descriptive qualitative research is to provide a factual with data collection using in-depth interview and observation techniques as well as the study of librarianship. The data obtained are then analyzed qualitatively to then be described based on indicators of research. The results showed that the role of DPPKAD in the management of Morowali Regency PAD in 2008-2011 includes (a) the planning targets, (b) implementation of the ballot box, (c) oversight of penetausahaan and (d) evaluation and reporting and not to the maximum. It can be seen, among others, of the low realization reached DPPKAD from the target PAD in any fiscal year i.e. 2008-2011 fiscal year. As for the supporting factors consisted of: (a) wages pick up; and (b) the grant of facilities operations, while restricting factors, among others: (a) the value of the acquisition Tax Taxable Objects too high; (b) the human resources of apparatus is still weak; (c) low income communities; (d) the Morowali Regency area are very spacious and consist of Islands; (e) the target PAD is too high so it is difficult to achieve.

Keywords: role, management, DPPKAD, Morowali, PAD

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang Peran DPPKAD dalam Pengelolaan PAD Kabupaten Morowali pada tahun 2008-2011 dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Peran DPPKAD dalam Pengelolaan PAD Kabupaten Morowali pada tahun 2008-2011. Tipe penelitian adalah deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran faktual dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan wawancara mendalam serta studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk kemudian dideskripsikan berdasarkan indikator penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran DPPKAD dalam pengelolaan PAD Kabupaten Morowali Tahun 2008-2011 meliputi (a) perencanaan target, (b) pelaksanaan pemungutan, (c) pengawasan atas penetausahaan dan (d) evaluasi dan pelaporan dan belum maksimal. Hal ini bisa dilihat antara lain dari rendahnya realisasi yang dicapai DPPKAD dari target PAD dalam setiap tahun anggaran yakni tahun anggaran 2008-2011. Adapun faktor-faktor pendukung terdiri dari: (a) upah pungut; dan (b) pemberian fasilitas operasional, sedangkan faktor-faktor penghambat antara lain: (a) Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak terlalu tinggi; (b) SDM aparatur yang masih lemah; (c) rendahnya pendapatan masyarakat; (d) wilayah Kabupaten Morowali yang sangat luas dan terdiri dari pulau-pulau; (e) target PAD yang terlalu tinggi sehingga sulit dicapai.

Kata Kunci: peran, pengelolaan, DPPKAD, Morowali, PAD

PENDAHULUAN

Salah satu tuntutan Reformasi 98' adalah Otonomi Daerah. Lahirnya tuntutan ini bisa dimaknai sebagai strategi atau solusi atas maraknya isu disintegrasi daerah. Ada banyak sebab lahirnya tuntutan itu. Salah satunya karena cara-cara penyelesaian problem kebangsaan oleh pemerintah yang militeristik. Padahal militeristik adalah ciri fasisme. Selain itu, otonomi daerah ini adalah bentuk kompromi dari pertikaian panjang antara dua konsep bentuk negara dengan akar historis dan filosofis sangat berbeda. Kedua konsep itu adalah bentuk negara federal dan bentuk Negara kesatuan yang masing-masing diadopsi dan dipertahankan oleh Muhammad Hatta dan Soekarno.

Reformasi telah membawa suasana baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prestasi reformasi (Chrisnandi, 2008) ditandai dengan rezim lama diturunkan dan digantikan rezim baru. Politik otoritarianisme digantikan politik demokrasi. Sentralisme dikubur dengan desentralisasi. Konstitusi lama (UUD 1945) diamandemen sebanyak empat kali. Multipartai menyediakan ruang bagi setiap orang untuk berkumpul dan mendirikan partai politik. Dibentuk lembaga baru seperti Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat daerah.

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui asas desentralisasi, otonomi daerah hadir untuk memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola sendiri urusan pemerintahan dalam upaya meningkatkan kemandirian daerah.

Desentralisasi merupakan sebuah proses di mana pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya dengan tujuan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menjalankan segala urusan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan Politik Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan, Yustisi, Moneter dan Fiskal Nasional, dan Agama. Karena itu adalah urusan pemerintahan yang hanya menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota. Urusan itu meliputi: (a) perencanaan dan pengendalian pembangunan, (b) perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang, (c) penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, (d) penyediaan sarana dan prasarana umum, (e) penanganan bidang kesehatan, (f) penyelenggaraan pendidikan, (g) penanggulangan masalah sosial, (h) pelayanan bidang ketenagakerjaan, (i) fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah, (j) pengendalian lingkungan hidup, (k) pelayanan pertanahan, (l) pelayanan kependudukan, dan catatan sipil, (m) pelayanan administrasi umum pemerintahan, (n) pelayanan administrasi penanaman modal, (o) penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya, (p) urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, dalam urusan keuangan, diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah. Perimbangan keuangan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah merupakan subsistem Keuangan Negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah. Pemberian sumber keuangan Negara kepada Pemerintah Daerah didasarkan atas penyerahan tugas kepada Pemerintah Daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal.

Otonomi Daerah telah lama menjadi wacana publik Indonesia. Meski demikian, dalam pelaksanaan otonomi daerah ini belum berjalan sebagaimana tujuan awalnya. Terdapat banyak ketimpangan dalam upaya pengimplementasian konsep otonomi daerah. Beragam realitas empirik dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Menurut Keban (Fakrulloh dkk, 2004), ada beberapa hal yang dapat mengganggu kinerja pencapaian tujuan otonomi daerah yaitu (1) adanya kesalahan strategis dalam perwujudan otonomi daerah; (2) perbedaan persepsi dan pemahaman tentang konsep otonomi daerah; (3) perbedaan paradigma otonomi daerah yang dianut oleh para elit politik; (4) paradigma birokrasi masih kuat.

Sebagai salah satu daerah otonom pasca pemekaran dari Kabupaten Poso tahun 2000, kabupaten Morowali tidak jauh dari realitas empirik tersebut. Pembangunan infrastruktur jalan dan fasilitas pelayanan umum lainnya belum begitu memadai. Berdasarkan data Dinas Kimpraswil Kabupaten Morowali dalam Angka 2001, menunjukkan bahwa ada 55% jalan negara, provinsi, dan kabupaten yang mengalami kerusakan. Hanya 18% jalan dalam kondisi baik. Atas dasar itu, pada Tahun Anggaran 2003 Kabupaten Morowali mendapatkan DAK non reboisasi sebesar Rp 1,6 M untuk perbaikan jalan.

Selain itu, salah satu problema yang dihadapi oleh sebagian daerah kabupaten/kota khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah dewasa ini adalah berkisar pada upaya peningkatan PAD. Problema ini muncul karena adanya kecenderungan berpikir dari sebagian kalangan birokrat di daerah yang menganggap bahwa parameter utama yang menentukan kemandirian suatu daerah dalam berotonomi adalah terletak pada besarnya PAD. Kecenderungan berpikir ini tidak lahir begitu saja tanpa landasan rasional dan empiris mengingat masih banyak daerah otonom yang masih mengandalkan dana perimbangan sebagai sumber utama ke-

uangan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Artinya, daerah-daerah itu belum mampu menjalankan desentralisasi.

Merujuk pada hasil penelitian Badan Peneliti dan Pengembangan Departemen Dalam Negeri bekerja sama dengan Universitas Gajah Mada, Syarifuddin Tayeb menyatakan bahwa dari 292 Daerah Kabupaten yang diteliti menunjukkan rendahnya kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pembiayaan daerah. Berikut rinciannya: 122 Daerah Kabupaten berkisar antara 0,53 % - 10 %; 86 Daerah Kabupaten berkisar antara 10 % - 20 %; 43 Daerah Kabupaten berkisar antara 20,1 % - 30 %; 17 Daerah Kabupaten berkisar antara 31,1 % - 50 %; dan 2 Daerah Kabupaten berkisar di atas 50 %.

Rendahnya kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pembiayaan daerah, karena daerah hanya diberikan kewenangan mobilisasi sumber dana pajak dan yang mampu memenuhi hanya sekitar 20% - 30% dari total penerimaan untuk membiayai kebutuhan rutin dan pembangunan, sementara 70% - 80% didrop dari pusat.

Mengingat banyaknya sumber-sumber PAD yang bisa dioptimalkan, daerah otonom tidak perlu mengandalkan dana perimbangan dalam pembiayaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Apalagi dalam konteks Kabupaten Morowali yang memiliki banyak kekayaan sumber daya alam. Pengelolaan kekayaan alam itu berbanding lurus dengan peningkatan jumlah wajib pajak dan retribusi daerah.

Kabupaten dengan visi "Morowali Menuju Kabupaten Agribisnis 2012" ini menyimpan kekayaan alam di sektor perkebunan, pertanian, peternakan, kelautan, pertambangan, dan pariwisata yang melimpah yang bisa dikelola untuk menambah sumber-sumber PAD dalam rangka meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai secara mandiri urusan rumah tangga daerah. Sektor-sektor potensial ini jika dikelola secara maksimal

akan membantu mempercepat pertumbuhan perekonomian masyarakat yang pada gilirannya akan menambah jumlah objek PAD. Misalnya, di sektor pertambangan dan perkebunan yang cukup mendominasi di Kabupaten Morowali, para pengusaha pertambangan dan perkebunan untuk melaksanakan usahanya pasti mengurus Surat Izin Usaha dan dokumen-dokumen lain yang dikenakan pajak maupun retribusi. Sebagai gambaran, pada tahun 2010 sektor pertambangan nikel memberikan kontribusi ke PAD sebesar Rp 4 M.

Sektor pertanian adalah tumpuan 76 persen penduduk. Pada tahun 2001 nilai kegiatan ekonomi pertanian Rp 527 miliar, sekitar 37 persen berasal dari perkebunan. Sektor perikanan, di antara 10 kecamatan hanya Kecamatan Mori Atas dan Lembo yang tidak memiliki garis pantai, sehingga ada 80 persen wilayah Morowali yang berpotensi untuk perikanan.

Di sektor pertambangan, terdapat Nikel dan marmer. Nikel dengan luas arealnya mencapai lebih kurang 149.700 hektar dengan cadangan terduga 8 juta WMT. Di sektor Minyak dan gas, terdapat Lapangan minyak Tiaka Blok Trili dengan fasilitas penunjang terletak sekitar 17 mil dari garis pantai. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa cadangan minyak di lapangan Tiaka (Original oil in Place – OOIP) sebesar 106,56 MMBO (Million barrel oil/juta barrel minyak). Total kapasitas produksi per hari mencapai sekitar 6.500 barrel (BOPD) yang diperoleh dari enam sumur produksi atau rata-rata produksi setiap sumur sebesar sekitar 1.100 BOPD. Gas bumi, dari hasil pemboran sumur produksi, dihasilkan juga gas ikutan sebanyak sekitar 3,5 TCF (Ton cubic feet) dengan air terproduksi sekitar 3.000 BOPD. Menurut data dari BPS Kabupaten Morowali tercatat lebih dari 100 Pemegang Izin Usaha Pertambangan di wilayah ini.

Melihat potensi kekayaan SDA Kabupaten Morowali sebagaimana diuraikan di atas,

DPPKAD sebagai salah satu SKPD, berpeluang besar untuk mengoptimalkan manajemen keuangan daerah hasil penerimaan dari sumber-sumber PAD. Dalam hal ini, dituntut efektivitas dan efisiensi pelaksanaan peran DPPKAD dalam manajemen keuangan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kecerdasan pengelolaan penerimaan keuangan dibutuhkan untuk memastikan semua pos anggaran pembelanjaan daerah dalam setiap tahun anggaran mendapat bagian secara proporsional. Selain itu, juga untuk menekan defisit APBD dalam setiap tahun anggaran.

Persoalannya kemudian, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Morowali dalam tiga tahun anggaran terakhir mengalami defisit. Tahun 2006 defisit APBD Morowali mencapai lebih Rp 75 miliar, tahun 2007 lebih Rp 63 miliar dan tahun anggaran 2008 mencapai lebih 63 miliar.

Di sisi lain, realisasi penerimaan PAD Kabupaten Morowali selama tiga Tahun berturut-turut yakni pada tahun anggaran 2007 sebesar Rp 8,80 M, 2008 sebesar Rp 14,53 M, 2009 sebesar Rp 13,82 M. Angka ini menunjukkan peningkatan PAD. Pertanyaannya, apakah rasio perbandingan antara kekayaan alam dengan PAD Kabupaten Morowali dalam tiga tahun terakhir itu, seimbang? Artinya, dengan melihat potensi kekayaan SDA, bukankah pemerintah daerah dalam hal ini DPPKAD dapat membuat target pencapaian PAD yang lebih besar?

Selain itu, Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Morowali pada tahun anggaran 2007 sebesar Rp 434,48 M, pada tahun 2008 sebesar Rp 373,308 M dan pada tahun 2009 sebesar Rp 368,918 M. Dibandingkan dengan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah, DAU Kabupaten Morowali tahun 2008 berada di urutan tertinggi ke dua setelah Kabupaten Banggai. Pada tahun 2009 berada pada urutan tertinggi ke tiga setelah Kabupaten Banggai. Padahal DAU hanya diperuntukkan bagi daerah dengan PAD kecil

sebagai upaya pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Artinya, Kabupaten ini masih sangat tergantung pada dana dari Pemerintah Pusat dalam membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Terkait dengan itu, ada beberapa hal yang relevan untuk dipertanyakan. Misalnya apakah secara aktual aparat DPPKAD Kabupaten Morowali dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sudah sesuai dengan ketentuan sebagaimana Peraturan Daerah?

Dalam hal strategi, apakah Pemerintah Daerah telah mengubah strategi mengenai teknis operasional lapangan terutama sistem pendataan ulang dalam rangka menjangkau semaksimal mungkin obyek pajak maupun subyek pajak sebagai dasar perhitungan dan pengenaan pajak? Untuk mengatasi permasalahan tersebut, apakah Pemerintah Kabupaten Morowali melalui DPPKAD telah melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap seluruh sumber penerimaan daerah, telah mengidentifikasi secara optimal sumber-sumber PAD yang baru?

Atas dasar ini, penulis melakukan penelitian tentang bagaimana peran salah satu SKPD yang banyak bergelut dalam pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah dengan judul "Peran DPPKAD dalam Manajemen Keuangan Daerah (Studi Tentang Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Morowali Tahun 2008-2011".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif yakni suatu metode yang menggambarkan atau melukiskan kenyataan serta keadaan objek yang diteliti secara sistematis, faktual dan akurat untuk kemudian dianalisis secara mendalam. Adapun data dari studi lapangan diperoleh

dengan menggunakan studi kepustakaan, wawancara dan observasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran DPPKAD dalam Pengelolaan PAD Kabupaten Morowali Tahun 2008-2011

Pada dasarnya, pengelolaan pendapatan daerah adalah bagian integral dari pengelolaan APBD dalam setiap tahun anggaran. Demikian halnya dengan PAD yang merupakan salah satu komponen dalam pendapatan daerah. Selain dari pengelolaan belanja dan pembiayaan, pengelolaan pendapatan adalah bagian integral dalam pengelolaan APBD. Penelitian ini difokuskan pada pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu komponen dalam APBD.

Oleh karena itu, untuk menghindari pembahasan yang membias, peran yang dimaksud dalam penelitian ini ialah peran DPPKAD yang berhubungan langsung dengan pengelolaan PAD. Sedangkan indikator pengelolaan yang dimaksud meliputi: Perencanaan Target PAD, Pelaksanaan Pemungutan PAD, Pengawasan atas Penatausahaan PAD, Pelaporan dan Evaluasi Realisasi PAD, yang dilakukan DPPKAD selama selang waktu 2008, 2009, 2010 dan 2011.

Berdasarkan tipe penelitian ini yakni deskriptif kualitatif, maka dalam pembahasan hasil penelitian, penulis menggambarkan tentang bagaimana peran DPPKAD dalam pengelolaan PAD. Dari hasil kegiatan pra penelitian, penulis menemukan fakta bahwa bidang yang bersentuhan langsung dengan pengelolaan PAD adalah Bidang Pendapatan. Oleh karena itu, dalam pembahasan ini penulis hanya memfokuskan pembahasan pada bagaimana peran DPPKAD dalam hal ini Bidang Pendapatan dalam pengelolaan PAD dalam empat tahun terakhir. Akan tetapi, tidak berarti bahwa peran bidang lain yang berhubungan dengan pengelolaan PAD tidak dibahas sama sekali, demikian halnya dengan SKPD lain yang memiliki keterkaitan dalam

penelitian ini. Penulis tetap menghubungkan peran bidang lain dalam lingkup DPPKAD dan SKPD-SKPD lain pengelola PAD sebagai sebuah kerja sistem dalam pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Morowali. Untuk itu, ada indikator yang penulis rumuskan dalam definisi operasional dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi Bidang Pendapatan dalam Pengelolaan PAD sesuai dengan Peraturan Bupati Morowali Nomor 14 Tahun 2008.

Perlu diketahui bahwa tugas pokok dan fungsi DPPKAD yang dirumuskan dalam Peraturan Bupati Morowali Nomor 14 Tahun 2008 hanya berupa acuan umum dalam pengelolaan PAD. Sedangkan pelaksanaan operasional tupoksi itu dijabarkan dalam kegiatan rutin setiap bidang dan seksi. Selain itu, dalam menjalankan perannya, DPPKAD juga mengacu pada visi dan misi Kabupaten Morowali yang terangkum dalam Grand Strategy sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Salah satu poin dalam Grand Strategy ini dijabarkan bahwa DPPKAD harus menerapkan pengelolaan, penatausahaan dan penyajian laporan keuangan secara tepat waktu dan akurat, sistem informasi keuangan (SIMKEU) secara online dan terintegrasi dan asset yang diinventarisir secara tepat

Uraian dari kegiatan-kegiatan rutin DPPKAD adalah penjabaran dari indikator-indikator dalam penelitian ini, untuk menggambarkan bagaimana peran DPPKAD dalam Pengelolaan PAD Kabupaten Morowali dalam empat tahun terakhir.

Atas dasar itu, untuk menggambarkan bagaimana pengelolaan PAD yang dilakukan DPPKAD dalam kurun waktu 2008-2011, penulis merumuskan indikator pengelolaan yang terdiri dari Perencanaan Target PAD, Pelaksanaan Pemungutan PAD, Pengawasan atas Penatausahaan PAD, Pelaporan dan Evaluasi Realisasi PAD.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peran DPPKAD dalam Pengelolaan PAD Kabupaten Morowali Tahun 2008-2011

1) Faktor-faktor Pendukung

Faktor-faktor pendukung dalam pengelolaan PAD oleh DPPKAD Kabupaten Morowali yang dimaksud dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan hasil penelusuran dokumen yang kemudian dianalisis. Jadi tidak dirumuskan sendiri oleh penulis untuk menjaga keakuratan data.

Faktor-faktor pendukung yang dimaksud dapat dilihat dari segi ketersediaan fasilitas operasional dalam pelaksanaan pemungutan PAD. Di antaranya melalui pemberian Upah Pungut dan pemberian fasilitas operasional sebagai bentuk penghargaan dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan PAD khususnya bagi pelaksana teknis di lapangan (UPTD DPPKAD Kecamatan).

a) Pemberian Upah Pungut

Upah Pungut ini dibayarkan sebesar 5% yang diberikan ketika pengelola UPTD DPPKAD Kecamatan ketika mencapai target yang telah ditentukan berdasarkan jenis PAD yang dikelola/dipungut.

b) Pemberian Fasilitas Operasional

Pemberian fasilitas operasional ini terkait dengan pengelolaan PBB yang belum termasuk dalam komponen PAD. Bentuk penghargaan ini adalah pemberian mobil operasional yang diberikan kepada Camat dan kendaraan roda dua kepada Kepala Desa berdasarkan kriteria sebagaimana yang diuraikan pada sub pembahasan Langkah-Langkah Perbaikan dalam Pengelolaan PAD ke depan. Meski dalam pelaksanaan pemberian penghargaan ini belum maksimal karena bergantung pada prestasi yang dicapai setiap kecamatan dalam pengelolaan PAD, langkah ini merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi guna meningkatkan capaian realisasi PAD dalam setiap tahun anggaran.

2) Faktor-faktor Penghambat

Dari hasil penelitian, penulis menemukan beberapa faktor yang menjadi penghambat bagi DPPKAD Kabupaten Morowali dalam pengelolaan PAD berdasarkan pengalaman tahun 2008-2011. Berikut ini hasil wawancara penulis dengan beberapa informan/responden terpilih.

Menurut Kepala Bidang Akuntansi (Alwi Gawi, SE), dalam pengelolaan PAD, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh aparatur DPPKAD khususnya petugas UPTD yang tersebar di 18 Kecamatan se-Kabupaten Morowali, meskipun sifatnya sangat teknis tetapi sangat menentukan dalam pengelolaan PAD seperti kredibilitas pemungut PAD. Menurut beliau, berapa pun besarnya hasil pungutan, jika petugas lapangan tidak jujur maka itu juga percuma. Oleh karena itu sangat dibutuhkan kejujuran para pemungut PAD karena DPPKAD tidak setiap saat turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengawasan tetapi hanya melakukan monitoring terbatas, itu pun dilakukan ketika ada masalah teknis di lapangan. Selain itu, kesadaran masyarakat yang masih rendah, dana operasional dan kendaraan operasional yang masih terbatas juga sangat mempengaruhi.

Selain itu, berdasarkan hasil pengamatan yang kemudian dianalisis penulis menemukan bahwa ada faktor lain yang menjadi penghambat bagi DPPKAD dalam pengelolaan PAD seperti soal kedisiplinan waktu masuk kantor dan penggunaan waktu untuk bekerja dalam setiap hari kerja. Masih banyak pegawai DPPKAD yang masuk kantor di atas pukul 10:00. Padahal semestinya harus masuk pada pukul 08:00. Bahkan tidak jarang Kepala Dinas atau Kepala Bidang yang datang terlebih dahulu dan harus menunggu pegawainya untuk mengerjakan tugas-tugas teknis.

Demikian halnya dengan penggunaan waktu jam kerja. Pada saat jam kerja masih banyak pegawai, baik yang berstatus PNS maupun honorer, yang tidak menggunakan jam

kerja secara maksimal untuk mengerjakan tugas-tugas kantor berdasarkan tugas pokok dan fungsinya masing-masing sehingga tidak jarang ada pekerjaan teknis yang tidak diselesaikan pada waktu yang semestinya. Sebagai contoh, seorang Kepala Bidang memerintahkan salah seorang pegawainya untuk membuat surat undangan. Surat undangan itu selesai dikerjakan dalam waktu kurang lebih 1 minggu kemudian yang seharusnya bisa diselesaikan dalam satu hari saja.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang kemudian dianalisis, penulis menyimpulkan beberapa hal penting yakni sebagai berikut:

Setiap instansi pemerintah daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan berdasarkan kewenangannya tidak terlepas dari Visi Misi Kabupaten yang dirumuskan dalam Grand Strategy dengan tetap berpedoman pada tugas pokok dan fungsinya.

Peraturan Bupati Morowali Nomor 14 Tahun 2008 tentang tugas pokok dan fungsi DPPKAD, hanya berupa acuan umum dalam pengelolaan PAD. Sedangkan pelaksanaan operasional tupoksi itu dijabarkan dalam kegiatan rutin setiap bidang dan seksi. Untuk itu penulis menjabarkan empat indikator yaitu: Perencanaan Target PAD, Pelaksanaan Pemungutan, Pengawasan atas Penaatausahaan, Evaluasi dan Pelaporan.

Penulis menemukan bahwa pengelolaan PAD Kabupaten Morowali dalam kurun waktu 2008-2011 belum maksimal. Hal ini bisa dilihat dari target dan realiasi PAD selama empat tahun terakhir. Pada tahun anggaran 2009, realisasi PAD Kabupaten Morowali sebesar Rp 13.820.311.687 dari target Rp 30.457.238.927 atau defisit Rp 16.636.927.240. Pada tahun anggaran 2010 sebesar Rp 17.417.709.460 dari target Rp 49.110.252.215 atau defisit Rp 31.692.542.755. Sedangkan pada tahun anggaran 2011 sebesar Rp 19.651.390.324 dari target Rp 46.947.

535.901 atau defisit Rp 27.296.145.577. Selisih antara target dengan realisasi PAD sangat besar dalam kurun waktu 2009-2011. Artinya, hanya pada tahun anggaran 2008, realisasi (sebesar Rp 14.533.137.053) PAD Kabupaten Morowali melampaui target (sebesar Rp 13.375.442.795) yakni surplus sebesar Rp 1.157.694.258.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Peran DPPKAD dalam Pengelolaan PAD Kabupaten Morowali tahun 2008-2011 meliputi faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat.

Faktor-faktor pendukung di antaranya adalah pemberian upah pungut dan pemberian fasilitas operasional. Sedangkan faktor-faktor penghambat di antaranya: : (a) Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak terlalu tinggi; (b) SDM aparatur yang masih lemah; (c) rendahnya pendapatan masyarakat; (d) wilayah Kabupaten Morowali yang sangat luas dan terdiri dari pulau-pulau; (e) target PAD yang terlalu tinggi sehingga sulit dicapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, I. (1989). *Pokok-Pokok Organisasi dan Manajemen*. Palu: Yayasan Pembinaan Umat "NURUL FALAH".
- Bagir, M. (1994). *Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah menurut UUD 1945*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Busroh, A.D. (1990). *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Chrisnandi, Y. (2008). *Beyond Parlemen: Dari Politik Kampus Hingga Sukses Kepemimpinan Nasional*. Jakarta: Penerbit Indo Hill Co.
- Darise, N. (2009). *Pengelolaan Keuangan Daerah: Pedoman Untuk Eksekutif dan Legislatif, Rangkuman 7 UU, 30 PP dan 15 Permendagri*. Jakarta: Indeks Jakarta.
- Fakrulloh, Z.A., Eko, S., dan Saragi, T. P. (2004). *Kebijakan Desentralisasi di Perimpangan Jalan*. Jakarta: CV. Cipruy.
- Gade, M. (2000). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Lembaga Penerbit
- Halim, A. (2004). *Akuntansi Pendapatan Daerah, Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hadiprojo, R. (1993). *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Manulang, M. (1997). *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Martoyo, S. (1988). *Pengetahuan Dasar Manajemen Dan Kepemimpinan*. Yogyakarta: BPFE.
- Kamaruddin, R. (2011). *Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Morowali*. Palu: Universitas Tadulako.
- Kansil, C.S.T dkk. (2008). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kimball, S., dan Kimball Jr, D.S. (1994). *Manajemen Pelayanan Masyarakat*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Moleong, L.J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muluk, K. (2007). *Model Peran Pemerintah Daerah, Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Ndraha, T. (2003). *Kybernology 1 (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya.
- Nuralam, A. (2001). *Pemerintahan Daerah, Jurnal Otonomi Daerah*. Jakarta: DEP-DAGRI,
- Poerwadarminta, W.J.S. (1985). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN. Balai Pustaka,
- Purcell, H. (2004). *Fasisme (Alih bahasa Faisol Feza dkk)*. Yogyakarta: Resist Book.
- Rasyid, M. R. (1997). *Makna Pemerintahan*. Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya
- Sarwoto. (1998). *Dasar-Dasar Organisasi Dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Siagian, S.P. (1984). *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung.
- Siahaan, M. P. (2005). *Pajak daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Siagian, SP. (1994). *Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku organisasi*. Jakarta: Gunung agung.
- Singarimbun, M., Effendi S. (1980). *Metode Penelitian Survei*, Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Studi Kependudukan, Universitas Gadjah Mada.
- Soekamto, S. (1982). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sunarto. (2005). *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Sutopo. (2001). *Administrasi Manajemen Dan Organisasi*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara RI.
- Thayeb, S. (2001). *Hasil Penelitian Badan Peneliti dan Pengembangan Depdagri dan UGM*. Yogyakarta.
- Thoha, M. (2008). *Perilaku Organisasi (konsep dasar dan aplikasinya)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tim Penyusun. (2008). *Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan*. Makassar: FISIP UNHAS.
- Toha, Charles. (2010). *Analisis Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Morowali*. Palu: Universitas Tadulako.
- Usman, H., dkk. (2008). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widjaja, HAW. (2003). *Otonomi Daerah Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yani, A. (2008). *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Dokumen Lain
- Harian ANTARA News, Koran Lokal Palu, Jumat, 21 Januari 2011
- Harian KOMPAS, Selasa, 01 Juli 2003
- RPJMD Kabupaten Morowali Tahun 2008-2012

Morowali Dalam Angka 2008	UU No 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Morowali Dalam Angka 2009	
Morowali Dalam Angka 2010	
Morowali Dalam Angka 2011	UU No 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan
Peraturan Bupati Morowali No 14 Tahun 2008 tentang Tupoksi DPPKAD Kabupaten Morowali	UU No 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah
Perda Kab. Morowali No 10 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 Tahun 2007 perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.	UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah
Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2007 Tanggal 6 Desember 2007 Tentang Rincian Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Tahun 2008.	UU No 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah
Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tanggal 24 Desember 2008 tentang Rincian Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2009.	UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Peraturan Bupati Morowali Nomor 14 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Masing-masing Jabatan pada Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Morowali, susunan organisasi DPPKAD Kabupaten Morowali.	PP No 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah dan PP No 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah	Data Online
UUD Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen IV)	http://www.017-implementasi-peraturan-daerah-kota.html
	http://bidanlia.blogspot.com/2009/07/teori-peran.html
	http://syakirablog.blogspot.com/2009/01/konsep-diri-peran.html
	http://www.ngada.org
	http://www.kompas.com/kompascetak/0307/01/daerah/401669.htm
	http://www.ochansangadji.co.nr